

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor publik di Indonesia *saat ini* di tandai dengan menguatnya keinginan masyarakat atas pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi sekaligus mengawasi kinerja pemerintahan. Selain itu didalam suatu pemerintahan yang baik diharuskan dapat mengelola sumber daya negara, dan salah satunya keuangan pemerintah. Pemerintahan dapat dikatakan baik apabila terlaksananya salah satu prinsip-prinsip *Good Government* yaitu dengan adanya Akuntabilitas dan Transparansi yang dapat memberikan dampak bagi berbagai aspek terutama dalam penyajian laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah dengan menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang diharapkan dapat dikelola dengan baik, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Tujuan dari sektor publik memberikan transparansi kepada publik agar hak-hak dan kebutuhan publik terpenuhi. Oleh karena itu adanya tuntutan pelayanan publik yang dapat memenuhi kepentingan bersama, dan terfasilitasnya partisipasi masyarakat terhadap proses kebijakan pemerintah, serta efektivitas kerja pemerintah menjadi sangat penting dan butuh perhatian pemerintah (Muammar, 2020).

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2018). Dimana setiap proses dan hasil pelayanan

publik dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sedangkan partisipatif berarti suatu pelayanan publik yang akan maksimal apabila ada keikutsertaan publik itu sendiri. Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah, yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pada Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010).

Kompetensi sumber daya manusia adalah faktor penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan tersebut dapat disusun tepat waktu (Pujanira, 2017). Apabila sumber daya manusia sudah memiliki kompetensi yang baik maka dapat menyelesaikan pekerjaan dengan efektif, efisien dan ekonomis. Laporan keuangan dapat diselesaikan secara cepat dengan adanya kompetensi yang dimiliki SDM. Hal ini terjadi karena telah didukung dari latar belakang pendidikan yang mumpuni, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Selain sumber daya manusia yang berkompeten, penerapan standar akuntansi pemerintahan juga memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan sebuah media untuk suatu entitas dalam hal ini pemerintah yang berfungsi untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat memberi kemudahan bagi publik untuk memahami apa yang terkandung di dalam laporan keuangan yang telah disusun tersebut. Laporan keuangan yang baik adalah yang terdapat unsur-unsur seperti relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah untuk memberikan laporan keuangan yang lebih akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah, akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik (Badjuri dan Trihapsari, 2004). Hal tersebut dilakukan seiring dengan adanya tuntutan masyarakat yang berkeinginan agar organisasi sektor publik lebih meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak masyarakat seperti hak ingin tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk di dengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menjadi subyek pemberi informasi yang memenuhi ketiga hak tersebut. Akuntansi pemerintahan berperan penting dalam memberikan informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial suatu pemerintah daerah untuk terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah antara lain penelitian Andita (2022) tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan (studi empiris OPD kota surabaya). Kemudian menggunakan penelitian Nugraheni dan Subaweh (2008) tentang pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Lalu menggunakan penelitian

Widari (2017) tentang pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sebagian besar penelitian, termasuk literatur pelaporan keuangan sektor publik yang telah melakukan penelitian tentang perubahan sistem akuntansi telah mengadopsi dasar teoritis yang berbeda dengan cara pandang tertentu. Pendekatan teoritis menunjukkan bahwa tidak adanya keterbatasan teori dalam menjelaskan proses tersebut. Lebih khusus lagi, ada kesempatan untuk mengeksplorasi metode penelitian yang dapat memengaruhi dinamika proses perubahan sistem akuntansi dalam konteks tertentu. (Joanne Lye, et all, 2005)

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan di Kota Metro yang belum pernah dilakukan penelitian dengan judul maupun variabel yang sama dengan penelitian ini. Selain itu jika kebanyakan penelitian terdahulu penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pada Kabupaten/Kota yang memperoleh opini WTP dari BPK, maka penelitian ini justru memilih Kota Metro yang berkali-kali mendapat opini WTP dari BPK.

Hasil dari pemeriksaan semester 1 tahun 2022 BPK telah memeriksa 541 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2021 dari 542 pemda. Dari 541 pemda, sebanyak 500 di antaranya memperoleh opini WTP (92,4%), 38 pemda memperoleh opini WDP (7%), dan tiga pemda memperoleh opini tidak menyatakan pendapat/TMP (0,6%). Berdasarkan tingkat pemerintahan, capaian opini WTP pemerintah provinsi sebanyak 34 laporan keuangan atau sebesar 100%. Kemudian pemerintah kabupaten sebanyak 377 dari 414 laporan keuangan atau 91%, dan pemerintah kota sebanyak 89 dari 93 laporan keuangan atau 96%. Merupakan hal yang esensial bahwa BPK senantiasa berupaya keras mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan. Salah satu Kabupaten yang mendapatkan opini tersebut yaitu Kota Metro. Bahkan Kota Metro telah mendapat opini WTP selama beberapa tahun berturut-turut

dengan pengecualian yang hampir sama setiap tahunnya. Namun masih terdapat temuan/catatan dari BPK tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Metro seperti penatausahaan aset tetap kurang tertib, pengelolaan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tidak memadai, realisasi atas belanja honorarium kepada personil pada perangkat unit kerja pengadaan barang/jasa (ukpbj) sekretariat daerah pemerintah kota metro tidak sesuai ketentuan, realisasi honorarium petugas pembantu pejabat penatausahaan keuangan yang ditetapkan oleh kepala skpd tidak sesuai ketentuan, pembayaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas pada dinas ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan tidak sesuai ketentuan, pengelolaan enam belas rekening pada tiga skpd tidak tertib, penyajian utang jangka pendek lainnya berupa uang jaminan pelanggan pada unit pelaksana teknis air minum (upt am) tidak tertib, Selain itu, tanah untuk jalan belum disajikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Permasalahan lain yaitu tanah yang digunakan untuk irigasi belum disajikan dan mutasi peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) juga tidak valid. (<https://info.metrokota.go.id/>)

Hal tersebut dirasa menarik bagi peneliti untuk melihat seberapa jauh hal tersebut bisa terjadi secara berturut-turut. Peneliti berusaha untuk mengetahui bagaimana hal itu bisa terjadi beserta faktor-faktor yang memengaruhi seperti prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia yang dijalankan sehingga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan oleh kota metro. Peneliti memilih variabel akuntabilitas karena dengan prinsip akuntabilitas akan tercipta suatu pertanggungjawaban dari pemerintah yaitu berupa penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah terhadap masyarakat yang telah memberikan wewenang untuk kepentingan tersebut. Ermino (2017). pada penelitian terdahulu menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pemilihan variabel transparansi karena dengan prinsip transparansi akan tercipta suatu kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam

memperoleh informasi yang akurat dan memadai, dalam hal ini yaitu dengan menerbitkan laporan keuangan pemerintah daerah. Transparansi adalah suatu keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, oleh karena itu transparansi merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam proses penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas dan transparansi termasuk ke dalam prinsip Good Government Governance (GGG) yang menjadi acuan tata kelola pemerintahan termasuk dalam membuat LKPD. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti ingin membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdapat variabel bebas yaitu akuntabilitas, transparasi dan komptensi sumber daya manusia terhadap variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah kota Metro.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang sudah diuraikan, makadari itu tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan dan informasi mengenai kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah, khususnya mengenai transparansi laporan keuangan kota metro, serta sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang hendak melakukan penelitian mengenai kualitas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi pegawai pemerintahan Kota Metro untuk meberikan pemahaman pentingnya akuntabilitas, transparsi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan, sehingga di harapkan dapat memberikan nilai lebih kepada pegawai pemerintahan dalam membuat ataupun menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan, bab simpulan dan saran.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan variabel terkait yaitu akuntabilitas, transparansi, penerapan sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat mengenai deskripsi data baik objek penelitian maupun variabel penelitian, serta akan dijelaskan mengenai hasil dari analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan keseluruhan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN